# PERAN BANK PAPUA DALAM MENINGKATKAN POTENSI SUMBER PENDAPATAN ASLI DAERAH DI KABUPATEN BIAK NUMFOR

Muh Reyza Dwi Alfiandi Ali
NPP. 33.1146
Program Studi Keuangan Publik
Email: reyzarey17082002@gmail.com

Pembimbing Skripsi: Drs. Decky Dwi Utomo, M.M.
Email: decky_dwi@ipdn.ac.id

## *ABSTRACT*

***Problem Statement (Research Gap):*** *This study is motivated by the unstable achievement of Local Own-Source Revenue (PAD) in Biak Numfor Regency, while local MSME activities continue to develop and Bank Papua, as a regional development bank, has provided financing to local business actors.* ***Purpose:*** *This study aims to identify the role of Bank Papua in increasing potential sources of Local Own-Source Revenue through MSME financing in Biak Numfor Regency.* ***Method:*** *This research uses a qualitative descriptive method with an inductive approach. Data were collected through interviews, observation, and documentation involving Bank Papua and MSME actors in Biak Numfor Regency.* ***Result:*** *The results show that Bank Papua has performed active, participatory, and passive roles through direct outreach, field visits, financing socialization, MSME credit products, and written or online information services. The main obstacles include uneven business administration, dispersed regional characteristics, prudential banking requirements, and limited use of digital information.* ***Conclusion:*** *Bank Papua's MSME financing contributes to strengthening local economic activity that is related to potential PAD sources, although further optimization requires stronger collaboration, direct mentoring, and digital service strengthening.*
***Keywords:*** *Bank Papua, Biak Numfor Regency, Local Own-Source Revenue, MSME financing*

## ABSTRAK

**Permasalahan (Kesenjangan Penelitian/Research Gap):** Penelitian ini dilatarbelakangi oleh belum optimalnya realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Biak Numfor, sementara aktivitas UMKM di daerah tersebut terus bergerak dan Bank Papua sebagai bank pembangunan daerah telah menyalurkan pembiayaan kepada pelaku usaha lokal. **Tujuan:** Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran Bank Papua dalam meningkatkan potensi sumber Pendapatan Asli Daerah melalui pembiayaan UMKM di Kabupaten Biak Numfor. **Metode:** Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan induktif. Data diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi dengan pihak Bank Papua serta pelaku UMKM di Kabupaten Biak Numfor. **Hasil/Temuan:** Hasil penelitian menunjukkan bahwa Bank Papua menjalankan peran aktif, partisipatif, dan pasif melalui pendekatan langsung kepada pelaku usaha, kunjungan lapangan, sosialisasi pembiayaan, penyediaan produk kredit UMKM, serta penyampaian informasi tertulis dan online. Hambatan yang ditemukan meliputi kerapian

administrasi usaha yang belum merata, sebaran wilayah dan ragam karakter usaha, tuntutan prinsip kehati-hatian perbankan, serta pemanfaatan informasi digital yang belum sepenuhnya kuat. **Kesimpulan:** Pembiayaan UMKM oleh Bank Papua berperan dalam memperkuat aktivitas ekonomi lokal yang berkaitan dengan potensi sumber PAD, namun optimalisasinya masih memerlukan penguatan kolaborasi, pendampingan langsung, dan layanan digital.
**Kata kunci:** Bank Papua, Biak Numfor, Pembiayaan UMKM, Pendapatan Asli Daerah

# I. PENDAHULUAN

## 1.1. Latar Belakang

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan salah satu pilar penting dalam pelaksanaan otonomi daerah karena menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. Semakin besar kontribusi PAD dalam struktur pendapatan daerah, semakin kuat pula kemandirian fiskal daerah. Sebaliknya, apabila pendapatan daerah masih sangat bergantung pada transfer pusat, maka ruang fiskal daerah untuk membiayai pembangunan secara mandiri menjadi terbatas (Marja Sinurat, Ihwan Sudrajat, 2022; Putra et al., 2024).

Dalam konteks pembangunan ekonomi lokal, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) memiliki posisi strategis karena mampu menyerap tenaga kerja, menggerakkan perdagangan, dan memperluas aktivitas ekonomi masyarakat. Perkembangan UMKM tidak hanya berdampak pada peningkatan pendapatan pelaku usaha, tetapi juga berhubungan dengan perluasan basis pajak dan retribusi daerah. Oleh karena itu, penguatan UMKM dapat dipandang sebagai salah satu jalur tidak langsung dalam memperkuat potensi sumber PAD karena aktivitas usaha yang lebih hidup dapat memperluas transaksi, mendorong formalisasi usaha, serta memperkuat ekonomi lokal (Eljawati, 2021; Erlando et al., 2020; Rosavina et al., 2019).

Penguatan UMKM tidak dapat dilepaskan dari akses pembiayaan. Modal usaha menjadi unsur penting bagi pelaku UMKM untuk menjaga keberlangsungan usaha, memperbesar kapasitas produksi, dan meningkatkan kualitas layanan. Lembaga perbankan memiliki peran strategis dalam menyediakan pembiayaan yang sesuai dengan karakter usaha kecil, terutama melalui fungsi intermediasi yang menghimpun dana masyarakat dan menyalurkannya kembali dalam bentuk kredit atau pembiayaan produktif. Riset internasional juga menunjukkan bahwa masalah utama pembiayaan UMKM sering berkaitan dengan asimetri informasi, keterbatasan agunan, biaya transaksi, serta rendahnya literasi keuangan, sehingga peran bank perlu diikuti dengan edukasi, penilaian kelayakan, dan pendampingan yang memadai (Anita, 2021; Miranda, 2025; Saifurrahman & Kassim, 2023; Sanga & Aziakpono, 2023).

Bank Papua sebagai Bank Pembangunan Daerah sekaligus Badan Usaha Milik Daerah memiliki kedudukan penting dalam menghubungkan kebutuhan pembiayaan pelaku ekonomi lokal dengan agenda pembangunan daerah. Bank Papua tidak hanya menjalankan fungsi komersial, tetapi juga menjadi instrumen pembangunan daerah melalui layanan perbankan, pengelolaan dana pemerintah daerah, penyaluran pembiayaan, serta kontribusi laba dan dividen kepada pemegang saham daerah. Dalam konteks pembiayaan usaha kecil, keberadaan bank lokal dan penguatan layanan digital dinilai dapat membantu mengurangi kendala pembiayaan UMKM karena bank lebih dekat dengan karakter usaha dan kondisi wilayahnya (Lu et al., 2022; Resubun et al., 2022).

Kabupaten Biak Numfor memiliki aktivitas UMKM yang terus bergerak, terutama pada sektor perdagangan, kuliner, jasa, peternakan, dan produksi lokal. Namun pada saat yang sama, realisasi PAD daerah ini belum sepenuhnya stabil. Kondisi tersebut menunjukkan perlunya

kajian mengenai bagaimana Bank Papua Cabang Biak menjalankan perannya dalam pembiayaan UMKM, hambatan apa yang dihadapi, dan bagaimana peran tersebut dapat dioptimalkan agar berhubungan lebih kuat dengan potensi sumber PAD Kabupaten Biak Numfor.

### 1.2. Kesenjangan Masalah yang Diambil

Kesenjangan masalah dalam penelitian ini dapat dilihat dari tiga sisi. Pertama, terdapat masalah empiris berupa belum optimalnya realisasi PAD Kabupaten Biak Numfor. Data tahun 2019-2023 memperlihatkan bahwa capaian PAD berfluktuasi dan pada tahun 2023 hanya mencapai 58,35 persen dari target. Kondisi ini menunjukkan bahwa sumber-sumber penerimaan daerah belum tergarap secara stabil, padahal penelitian mengenai PAD menegaskan bahwa pajak daerah, retribusi daerah, dan penggalian potensi ekonomi lokal tetap menjadi ruang penting dalam memperkuat kemandirian fiskal daerah (Eljawati, 2022; Kekry, 2020; Riswati, 2022).

Kedua, terdapat kesenjangan konseptual karena hubungan antara pembiayaan UMKM oleh perbankan dan potensi sumber PAD tidak selalu dapat dijelaskan secara langsung. Penelitian terdahulu menunjukkan bahwa penyaluran Kredit Usaha Rakyat berpengaruh positif terhadap produktivitas dan pendapatan UMKM, tetapi penelitian tersebut belum menghubungkan pembiayaan UMKM dengan potensi PAD daerah (Anggraeni & Rahayu, 2024). Pada sisi lain, kajian internasional menekankan bahwa akses pembiayaan, digitalisasi keuangan, dan kehadiran bank lokal dapat mengurangi kendala pembiayaan UMKM, sehingga hubungan tersebut perlu dibaca sebagai proses penguatan aktivitas ekonomi lokal yang berpotensi memperluas basis penerimaan daerah (Lu et al., 2022; Saifurrahman & Kassim, 2023; Sanga & Aziakpono, 2023).

Ketiga, terdapat kesenjangan kontekstual karena kajian mengenai Bank Papua umumnya lebih banyak menempatkan bank sebagai BUMD atau objek kebijakan daerah, sedangkan kajian yang secara khusus melihat peran Bank Papua Cabang Biak dalam pembiayaan UMKM dan hubungannya dengan potensi PAD Kabupaten Biak Numfor masih terbatas. Oleh karena itu, penelitian ini diarahkan untuk membaca peran Bank Papua secara lebih kontekstual melalui dimensi peran aktif, partisipatif, dan pasif.

### 1.3. Urgensi Penelitian

Penelitian ini penting dilakukan karena penguatan PAD tidak cukup hanya dilihat dari sisi pemungutan pajak dan retribusi, tetapi juga dari penguatan aktivitas ekonomi yang menjadi basis penerimaan daerah. UMKM yang berkembang, tercatat, dan memiliki akses pembiayaan lebih baik akan lebih berpeluang meningkatkan omzet, memperluas transaksi, dan menjadi bagian dari ekosistem ekonomi formal daerah. Hal ini sejalan dengan kajian pengelolaan pajak daerah yang menekankan pentingnya pendataan, sosialisasi, kesadaran wajib pajak, dan identifikasi potensi ekonomi masyarakat sebagai bagian dari strategi peningkatan PAD (Riswati, 2022; Weku et al., 2023; Widowati Johannes et al., 2023).

Secara praktis, penelitian ini dapat memberi masukan bagi Bank Papua dan Pemerintah Kabupaten Biak Numfor dalam merancang strategi pembiayaan, pendampingan, dan digitalisasi UMKM yang lebih tepat sasaran. Secara akademik, penelitian ini memperkaya kajian keuangan publik mengenai hubungan antara peran Bank Pembangunan Daerah, pembiayaan UMKM, dan potensi sumber PAD di tingkat kabupaten, terutama karena literatur internasional menunjukkan bahwa pembiayaan dan inklusi keuangan lebih efektif ketika diikuti pengurangan asimetri informasi, pemanfaatan teknologi keuangan, dan pendekatan lembaga keuangan lokal yang memahami kondisi pelaku usaha (Lu et al., 2022; Saifurrahman & Kassim, 2023; Sanga & Aziakpono, 2023).

## 1.4. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu membahas implementasi kebijakan BUMD Bank Papua dalam peningkatan PAD Provinsi Papua (Mustakim et al., 2024). Penelitian tersebut relevan karena sama-sama menempatkan Bank Papua sebagai objek kajian, tetapi fokusnya berada pada implementasi kebijakan, sedangkan penelitian ini menitikberatkan pada pembiayaan UMKM dan potensi PAD di Kabupaten Biak Numfor.

Penelitian terdahulu menganalisis kontribusi dividen BUMD terhadap PAD Provinsi Jawa Barat (Priatman, 2023). Penelitian tersebut menunjukkan bahwa kinerja BUMD dapat berhubungan dengan penerimaan daerah melalui dividen. Namun, penelitian ini tidak hanya membaca jalur dividen, melainkan juga jalur intermediasi pembiayaan UMKM sebagai penguat aktivitas ekonomi lokal.

Penelitian terdahulu membuktikan bahwa penyaluran KUR berpengaruh positif terhadap produktivitas dan pendapatan UMKM (Anggraeni & Rahayu, 2024). Temuan ini menjadi dasar bahwa pembiayaan perbankan dapat meningkatkan kapasitas usaha, tetapi penelitian tersebut belum mengaitkan dampak pembiayaan dengan potensi PAD daerah.

Penelitian mengenai kemampuan keuangan daerah di Provinsi Papua menunjukkan bahwa beberapa daerah, termasuk Biak Numfor, masih menghadapi tantangan kemandirian fiskal (Kekry, 2020). Sementara itu, kajian mengenai penyaluran kredit BPD menekankan bahwa penyaluran kredit dipengaruhi oleh Dana Pihak Ketiga dan Non Performing Loan, sehingga fungsi pembangunan bank tetap harus dijalankan secara hati-hati (Rarassati et al., 2022). Penelitian lain juga menegaskan bahwa pendapatan jasa perbankan dapat memperkuat kinerja bank daerah (Gunawan et al., 2025). Berbagai penelitian tersebut menjadi pijakan bagi penelitian ini untuk melihat Bank Papua dari sisi peran pembiayaan UMKM, hambatan, dan upaya optimalisasinya.

Pada level internasional, kajian mengenai adopsi peer-to-peer lending oleh UMKM di Indonesia menunjukkan bahwa akses pembiayaan alternatif dipengaruhi oleh kepercayaan, kemudahan penggunaan, serta kebutuhan pelaku usaha terhadap sumber modal yang lebih cepat dan fleksibel (Rosavina et al., 2019). Kajian tersebut relevan karena menunjukkan bahwa pembiayaan UMKM tidak hanya bergantung pada ketersediaan dana, tetapi juga pada cara lembaga keuangan membangun kepercayaan dan kemudahan akses bagi pelaku usaha.

Kajian mengenai inklusi keuangan menunjukkan bahwa inklusi keuangan memiliki hubungan dengan pertumbuhan ekonomi dan pengurangan kemiskinan di kawasan Indonesia Timur (Erlando et al., 2020). Temuan tersebut penting bagi penelitian ini karena Biak Numfor berada dalam konteks wilayah timur Indonesia, sehingga pembiayaan UMKM oleh Bank Papua dapat dipahami sebagai bagian dari upaya memperkuat inklusi keuangan dan aktivitas ekonomi lokal.

Kajian terdahulu menjelaskan bahwa peningkatan inklusi keuangan UMKM membutuhkan upaya mengurangi asimetri informasi antara bank dan pelaku usaha (Saifurrahman & Kassim, 2023). Sementara itu, kajian financial technology menegaskan bahwa financial technology dapat membuka akses pembiayaan UMKM melalui pengurangan biaya transaksi dan peningkatan informasi (Sanga & Aziakpono, 2023), sedangkan penelitian tentang bank lokal dan inklusi keuangan digital menunjukkan bahwa keduanya dapat membantu mengurangi kendala pembiayaan UMKM (Lu et al., 2022). Ketiga penelitian ini memperkuat kebutuhan Bank Papua untuk menggabungkan pembiayaan, survei lapangan, literasi, dan layanan digital.

Kajian dari lingkungan IPDN juga mendukung fokus penelitian ini. Penelitian mengenai pengelolaan pajak daerah menegaskan pentingnya pengelolaan pajak daerah, pendataan, dan

strategi jemput bola dalam meningkatkan PAD (Riswati, 2022). Kajian tentang retribusi daerah menunjukkan bahwa retribusi daerah dapat menjadi potensi PAD apabila aktivitas masyarakat, destinasi, dan layanan daerah dikelola secara optimal (Eljawati, 2022). Penelitian mengenai pajak restoran menjelaskan bahwa pengelolaan pajak restoran membutuhkan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengawasan, sosialisasi, dan pendataan wajib pajak agar kontribusinya terhadap PAD semakin kuat (Weku et al., 2023).

Penelitian mengenai pajak reklame menunjukkan bahwa strategi pengelolaan pajak reklame terhadap PAD perlu memperhatikan sumber daya, kesadaran wajib pajak, dan kepatuhan terhadap aturan (Widowati Johannes et al., 2023). Selanjutnya, kajian mengenai optimalisasi pemanfaatan aset daerah menekankan bahwa optimalisasi pemanfaatan aset daerah dapat meningkatkan PAD apabila didukung identifikasi, inventarisasi, penilaian, analisis pemanfaatan, dan sistem informasi manajemen aset (Eljawati & Nurafdaliana, 2024). Berbagai penelitian IPDN tersebut menjadi penguat bahwa peningkatan PAD perlu dilihat melalui penggalian potensi ekonomi, pendataan, tata kelola, dan kolaborasi, bukan hanya melalui penetapan target penerimaan.

### 1.5. Pernyataan Kebaruan Ilmiah

Kebaruan ilmiah penelitian ini terletak pada fokus kajian yang menghubungkan peran Bank Papua Cabang Biak dalam pembiayaan UMKM dengan potensi sumber PAD Kabupaten Biak Numfor. Penelitian ini tidak hanya membahas Bank Papua sebagai BUMD dan tidak hanya menilai pembiayaan dari sisi pendapatan UMKM, tetapi membaca pembiayaan sebagai bagian dari penguatan aktivitas ekonomi lokal yang berpotensi memperluas basis penerimaan daerah.

Kebaruan lainnya terletak pada penggunaan teori peran Soerjono Soekanto yang membagi peran ke dalam peran aktif, partisipatif, dan pasif untuk membaca praktik pembiayaan UMKM oleh Bank Papua. Dengan kerangka tersebut, penelitian ini mampu menunjukkan bahwa peran bank tidak hanya berupa pemberian kredit, tetapi juga mencakup pendekatan langsung, kunjungan lapangan, sosialisasi, penyediaan informasi, dan penguatan layanan digital.

### 1.6. Tujuan

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran Bank Papua dalam meningkatkan potensi sumber Pendapatan Asli Daerah melalui pembiayaan UMKM di Kabupaten Biak Numfor.

## II. METODE

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan induktif. Pendekatan ini dipilih karena penelitian tidak bertujuan menguji hubungan statistik antarvariabel, melainkan memahami secara mendalam bagaimana Bank Papua menjalankan peran pembiayaan UMKM, hambatan yang dihadapi, dan upaya yang dilakukan dalam konteks peningkatan potensi sumber PAD Kabupaten Biak Numfor.

Sumber data penelitian terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan pihak Bank Papua yang memahami kebijakan dan pelaksanaan pembiayaan UMKM serta pelaku UMKM penerima pembiayaan Bank Papua. Data sekunder diperoleh dari dokumen perkembangan PAD Kabupaten Biak Numfor, indikator aktivitas UMKM, dokumen tata kelola Bank Papua, dokumentasi kegiatan dukungan UMKM, dan literatur penelitian terdahulu.

Informan dipilih menggunakan teknik purposive sampling, yaitu memilih informan berdasarkan keterlibatan dan pemahaman langsung terhadap fokus penelitian. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Observasi diarahkan pada proses pelayanan pembiayaan UMKM dan interaksi Bank Papua dengan pelaku usaha, sedangkan dokumentasi digunakan untuk memperkuat data wawancara dengan data tertulis yang relevan.

Analisis data dilakukan secara induktif melalui tahapan pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, serta penarikan dan verifikasi kesimpulan sebagaimana model Miles dan Huberman. Data hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi dikelompokkan ke dalam kategori peran aktif, peran partisipatif, peran pasif, hambatan, dan upaya optimalisasi. Hasil analisis kemudian ditafsirkan untuk menjawab rumusan masalah penelitian.

## III. HASIL DAN PEMBAHASAN

### 3.1 Kondisi PAD dan Aktivitas UMKM di Kabupaten Biak Numfor

Pembahasan mengenai peran Bank Papua perlu ditempatkan pada konteks kinerja PAD dan aktivitas UMKM lokal. Data PAD menunjukkan bahwa capaian PAD Kabupaten Biak Numfor selama 2019-2023 bergerak fluktuatif dan belum stabil. Pada 2019 dan 2020 capaian PAD masih mendekati target, tetapi pada 2021 menurun menjadi 63,54 persen, sempat membaik pada 2022, lalu kembali turun pada 2023 menjadi 58,35 persen.

**Tabel 1.**
**Perkembangan Target dan Realisasi PAD Kabupaten Biak Numfor Tahun 2019-2023**

| Tahun | Target PAD (Rp) | Realisasi PAD (Rp) | Capaian (%) |
|---|---|---|---|
| 2019 | 111.971.172.937,07 | 111.837.784.374,91 | 99,88 |
| 2020 | 102.143.740.950,98 | 98.422.150.504,18 | 96,36 |
| 2021 | 103.623.267.641,00 | 65.839.462.413,98 | 63,54 |
| 2022 | 107.152.747.070,00 | 95.175.553.249,67 | 88,82 |
| 2023 | 44.021.025.027,00 | 25.685.408.105,42 | 58,35 |

*Sumber: Data target dan realisasi PAD Kabupaten Biak Numfor dalam dokumen penelitian penulis, diolah kembali, 2026.*

Di sisi lain, indikator aktivitas UMKM di Kabupaten Biak Numfor menunjukkan pergerakan positif. Jumlah koperasi aktif meningkat dari 246 unit pada tahun 2020 menjadi 271 unit pada tahun 2023. Pada periode yang sama, jumlah rumah makan/restoran meningkat dari 62 unit menjadi 79 unit. Peningkatan ini menunjukkan bahwa aktivitas ekonomi rakyat tetap bergerak meskipun kinerja PAD belum sepenuhnya stabil.

**Tabel 2.**
**Perkembangan Indikator Aktivitas UMKM di Kabupaten Biak Numfor Tahun 2020-2023**

| Tahun | Koperasi Aktif | Rumah Makan/Restoran | Perubahan Tahunan | Keterangan Utama |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | 246 | 62 | - | Titik awal data. |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 2021 | 262 | 66 | +16 koperasi; +4 restoran | Aktivitas meningkat. |
| 2022 | 262 | 72 | 0 koperasi; +6 restoran | Koperasi stabil; restoran bertambah. |
| 2023 | 271 | 79 | +9 koperasi; +7 restoran | Pertumbuhan berlanjut. |

*Sumber: Kabupaten Biak Numfor Dalam Angka 2021, 2023, dan 2024, diolah penulis, 2026.*

### 3.2 Peran Bank Papua dalam Penyaluran Pembiayaan UMKM

Berdasarkan teori peran Soekanto, peran Bank Papua dalam pembiayaan UMKM dapat dibaca melalui tiga bentuk, yaitu peran aktif, peran partisipatif, dan peran pasif. Ketiga peran tersebut muncul dalam praktik pembiayaan UMKM di Kabupaten Biak Numfor melalui pendekatan langsung, kerja sama program, sosialisasi, penyediaan produk kredit, serta penyampaian informasi pembiayaan. Pola tersebut sejalan dengan temuan bahwa akses pembiayaan UMKM tidak cukup hanya disediakan dalam bentuk produk, tetapi perlu diperkuat melalui kedekatan lembaga keuangan, pengurangan asimetri informasi, dan penyediaan informasi yang mudah dipahami pelaku usaha (Lu et al., 2022; Saifurrahman & Kassim, 2023).

**Tabel 3.**
**Ringkasan Peran Bank Papua dalam Pembiayaan UMKM di Kabupaten Biak Numfor**

| Dimensi Peran | Bentuk Temuan | Makna terhadap Potensi PAD |
|---|---|---|
| Peran Aktif | Bank menghubungi UMKM, melakukan pendekatan langsung, dan petugas datang ke lokasi usaha untuk melihat kondisi usaha. | Mendorong akses pembiayaan bagi usaha yang berpotensi berkembang dan memperkuat aktivitas ekonomi lokal. |
| Peran Partisipatif | Bank terlibat dalam kerja sama program pembiayaan, sosialisasi, pasar digital, dan kegiatan pemberdayaan UMKM. | Mendekatkan layanan keuangan dengan pelaku usaha serta memperluas literasi pembiayaan dan transaksi digital. |
| Peran Pasif | Bank menyediakan produk kredit khusus UMKM serta informasi tertulis dan online mengenai pembiayaan. | Memberi fasilitas pembiayaan formal yang dapat dimanfaatkan UMKM sesuai kebutuhan dan kesiapan usaha. |

*Sumber: Hasil penelitian penulis, diolah, 2026.*

#### 3.2.1 Peran Aktif

Peran aktif Bank Papua terlihat dari inisiatif bank dalam mendatangi atau menghubungi pelaku UMKM untuk menawarkan pembiayaan. Bank tidak hanya menunggu pelaku usaha datang ke kantor, tetapi juga membangun komunikasi awal melalui kunjungan, telepon, dan

informasi dari jaringan lapangan. Pola ini penting karena tidak semua pelaku UMKM terbiasa mengakses layanan perbankan secara mandiri.

Kunjungan petugas bank ke tempat usaha menjadi bagian penting dalam proses penilaian kelayakan pembiayaan. Petugas tidak hanya memeriksa berkas, tetapi juga melihat kondisi usaha, perputaran penjualan, kebutuhan modal, pemasok, pembeli, dan kemampuan usaha membayar angsuran. Dengan demikian, survei lapangan berfungsi sebagai bentuk pelayanan aktif sekaligus mekanisme pengendalian risiko kredit.

Temuan ini menunjukkan bahwa peran aktif Bank Papua bersifat selektif dan terarah. Bank lebih mudah menjangkau usaha yang telah berjalan, dapat diverifikasi, dan memiliki prospek usaha yang cukup jelas. Selektivitas tersebut dapat dipahami karena Bank Papua tetap harus menjaga prinsip kehati-hatian perbankan agar fungsi pembangunan daerah tidak menimbulkan risiko kredit bermasalah.

### 3.2.2 Peran Partisipatif

Peran partisipatif Bank Papua terlihat dari keterlibatan bank dalam kerja sama program pembiayaan dan pemberdayaan UMKM. Bank Papua Cabang Biak tidak bergerak sendiri, tetapi turut hadir dalam kegiatan bersama pemerintah daerah, kelurahan, distrik, komunitas usaha, dan forum yang mempertemukan pelaku usaha dengan layanan keuangan formal.

Keterlibatan tersebut tampak melalui kegiatan seperti Pasar Digital, pameran UMKM, sosialisasi bantuan modal mikro, dan pengenalan Kredit Usaha Rakyat. Kegiatan semacam ini tidak hanya memperkenalkan produk pembiayaan, tetapi juga membangun kepercayaan pelaku UMKM terhadap layanan perbankan. Dalam konteks Biak Numfor, pendekatan partisipatif penting karena karakter usaha sangat beragam dan sebagian pelaku usaha masih lebih nyaman memperoleh informasi melalui komunikasi langsung. Penguatan informasi dan pemanfaatan kanal digital juga relevan karena adopsi layanan keuangan oleh UMKM banyak dipengaruhi oleh kepercayaan, kemudahan penggunaan, dan persepsi manfaat bagi usaha (Rosavina et al., 2019; Sanga & Aziakpono, 2023).

Peran partisipatif juga tampak dalam ajakan kepada pelaku UMKM untuk mengikuti sosialisasi pembiayaan. Materi yang disampaikan umumnya berkaitan dengan syarat kredit, kemampuan angsuran, pencatatan usaha, penggunaan dana kredit, dan pemanfaatan layanan digital. Walaupun bentuknya masih banyak berupa sosialisasi dasar, kegiatan ini membantu pelaku usaha memahami pembiayaan secara lebih praktis.

### 3.2.3 Peran Pasif

Peran pasif Bank Papua terlihat dari penyediaan produk kredit khusus UMKM dan informasi pembiayaan yang dapat diakses pelaku usaha. Dalam kerangka peran pasif, bank tidak selalu harus turun langsung pada setiap pelaku usaha, tetapi menyediakan fasilitas, prosedur, dan informasi yang memungkinkan UMKM mengakses pembiayaan sesuai kebutuhan.

Produk kredit UMKM menjadi sarana bagi pelaku usaha untuk menambah modal kerja, memperbesar kapasitas usaha, dan menata kebutuhan operasional. Namun hasil penelitian menunjukkan bahwa keberadaan produk saja belum cukup apabila pelaku UMKM belum memahami syarat, manfaat, risiko, dan kewajiban pembiayaan. Oleh karena itu, peran pasif perlu diperkuat dengan komunikasi langsung dan edukasi yang mudah dipahami.

Informasi tertulis dan online tentang kredit UMKM juga mulai penting karena mendukung digitalisasi layanan perbankan. Meskipun demikian, temuan lapangan menunjukkan bahwa informasi digital belum sepenuhnya menggantikan pendampingan tatap muka. Bagi

sebagian UMKM, komunikasi langsung masih menjadi sarana utama untuk mengubah informasi menjadi keputusan usaha.

### 3.3 Hambatan Bank Papua dalam Meningkatkan Potensi Sumber PAD melalui Pembiayaan UMKM

Hambatan pertama berasal dari kerapian administrasi dan pencatatan usaha UMKM yang belum merata. Sebagian pelaku usaha belum memisahkan keuangan usaha dan rumah tangga, belum memiliki pencatatan sederhana, atau belum memiliki dokumen usaha yang lengkap. Kondisi ini menyulitkan bank dalam membaca kemampuan bayar dan kelayakan pembiayaan. Hambatan administrasi tersebut sejalan dengan literatur pembiayaan UMKM yang menekankan bahwa asimetri informasi, rendahnya dokumentasi usaha, dan keterbatasan riwayat keuangan menjadi penyebab utama sulitnya pelaku usaha kecil memperoleh pembiayaan formal (Rosavina et al., 2019; Saifurrahman & Kassim, 2023).

Hambatan kedua berkaitan dengan sebaran wilayah dan ragam karakter usaha di Kabupaten Biak Numfor. Wilayah yang memiliki karakter kepulauan, jarak antarkecamatan, serta kondisi akses yang beragam membuat pendekatan kepada UMKM tidak dapat diseragamkan. Usaha di pusat ekonomi seperti Biak Kota dan Samofa relatif lebih mudah dijangkau dibandingkan usaha di wilayah yang lebih tersebar.

Hambatan ketiga adalah kebutuhan menjaga keseimbangan antara fungsi pembangunan daerah dan prinsip kehati-hatian perbankan. Sebagai bank pembangunan daerah, Bank Papua memiliki tanggung jawab mendukung ekonomi lokal, tetapi sebagai lembaga perbankan bank tetap harus menilai risiko, kualitas kredit, dan kemampuan nasabah memenuhi kewajiban.

Hambatan keempat berkaitan dengan pemanfaatan informasi digital yang belum sepenuhnya kuat. Layanan digital seperti QRIS dan mobile banking mulai berkembang, tetapi keputusan pelaku usaha dalam mengambil pembiayaan masih banyak bergantung pada komunikasi langsung dengan petugas bank. Hal ini menunjukkan bahwa digitalisasi harus berjalan berdampingan dengan pendampingan tatap muka karena teknologi keuangan dapat memperluas akses pembiayaan, tetapi efektivitasnya tetap dipengaruhi literasi digital, kepercayaan, biaya penggunaan, dan kesiapan pelaku usaha (Lu et al., 2022; Sanga & Aziakpono, 2023).

### 3.4 Upaya Bank Papua dalam Mengoptimalkan Peran Pembiayaan UMKM

Upaya pertama adalah memperkuat pendekatan jemput bola dan survei lapangan. Pendekatan ini diperlukan agar bank dapat menjangkau pelaku UMKM yang potensial, memahami kondisi usaha secara langsung, dan menilai kebutuhan pembiayaan secara lebih tepat. Survei lapangan juga menjadi sarana bagi bank untuk menjaga kualitas kredit. Strategi ini penting karena kedekatan lembaga keuangan dengan pelaku usaha dapat membantu mengurangi kendala pembiayaan dan memperbaiki kualitas informasi dalam proses penilaian kredit (Lu et al., 2022; Saifurrahman & Kassim, 2023).

Upaya kedua adalah memperkuat kolaborasi, sosialisasi, dan kegiatan pemberdayaan. Bank Papua perlu terus bekerja sama dengan pemerintah daerah, kelurahan, komunitas usaha, dan pihak terkait lainnya untuk mendekatkan layanan pembiayaan kepada pelaku UMKM. Kolaborasi juga penting untuk memperkuat legalitas, pencatatan usaha, dan literasi keuangan pelaku UMKM. Kajian IPDN mengenai PAD juga menunjukkan bahwa sosialisasi, pendataan, pemetaan potensi, dan koordinasi lintas perangkat daerah menjadi faktor penting dalam

memperkuat penerimaan daerah (Eljawati, 2022; Riswati, 2022; Weku et al., 2023; Widowati Johannes et al., 2023).

Upaya ketiga adalah menyesuaikan produk dan besaran pembiayaan dengan karakter usaha lokal. UMKM di Biak Numfor memiliki skala yang beragam, mulai dari usaha mikro harian hingga usaha yang sudah berkembang. Oleh karena itu, pembiayaan perlu disesuaikan dengan kebutuhan, kapasitas, dan risiko masing-masing usaha.

Upaya keempat adalah memperkuat informasi, literasi, dan layanan digital tanpa meninggalkan pendampingan langsung. Digitalisasi transaksi dapat membantu pencatatan aktivitas usaha, memperluas akses layanan, dan memperkuat jejak transaksi UMKM. Namun pendampingan langsung tetap diperlukan agar pelaku usaha memahami manfaat dan konsekuensi pembiayaan secara utuh. Dengan demikian, digitalisasi perbankan perlu diarahkan bukan hanya sebagai layanan transaksi, tetapi juga sebagai instrumen edukasi, pencatatan usaha, dan pengurangan kendala pembiayaan UMKM (Rosavina et al., 2019; Sanga & Aziakpono, 2023).

### 3.5 Diskusi Temuan Utama Penelitian

Temuan utama penelitian ini menunjukkan bahwa peran Bank Papua dalam pembiayaan UMKM di Kabupaten Biak Numfor tidak hanya berupa penyaluran kredit, tetapi juga mencakup pendekatan langsung, sosialisasi, kerja sama program, penyediaan produk, dan penguatan informasi. Dengan demikian, Bank Papua menjalankan fungsi intermediasi sekaligus fungsi pembangunan daerah.

Temuan ini memperkuat hasil penelitian terdahulu yang menunjukkan bahwa pembiayaan perbankan dapat meningkatkan produktivitas dan pendapatan UMKM (Anggraeni & Rahayu, 2024). Namun penelitian ini menambahkan perspektif bahwa penguatan UMKM melalui pembiayaan juga dapat berhubungan dengan potensi sumber PAD melalui peningkatan aktivitas ekonomi lokal, perluasan transaksi, dan peluang formalisasi usaha. Temuan tersebut juga sejalan dengan penelitian internasional yang menunjukkan bahwa inklusi keuangan, bank lokal, pembiayaan digital, dan pengurangan asimetri informasi memiliki peran dalam memperluas akses pembiayaan bagi UMKM (Erlando et al., 2020; Lu et al., 2022; Rosavina et al., 2019; Saifurrahman & Kassim, 2023; Sanga & Aziakpono, 2023).

Penelitian ini juga sejalan dengan kajian yang menunjukkan pentingnya Bank Papua dalam kebijakan daerah (Mustakim et al., 2024), tetapi memperluas pembahasan dari aspek implementasi kebijakan ke aspek peran pembiayaan UMKM. Selain itu, temuan mengenai prinsip kehati-hatian perbankan sejalan dengan kajian yang menekankan bahwa penyaluran kredit BPD harus tetap memperhatikan kualitas kredit dan risiko pembiayaan (Rarassati et al., 2022).

Secara keseluruhan, kontribusi Bank Papua terhadap potensi PAD di Kabupaten Biak Numfor lebih tepat dipahami sebagai kontribusi tidak langsung. Pembiayaan UMKM memperkuat modal usaha, meningkatkan aktivitas ekonomi, memperluas transaksi, dan mendorong pelaku usaha menuju ekosistem usaha yang lebih formal. Jika didukung oleh pendataan, kolaborasi, dan kebijakan pajak-retribusi yang proporsional, penguatan UMKM dapat menjadi salah satu ruang peningkatan potensi PAD daerah. Kesimpulan ini juga diperkuat oleh kajian-kajian IPDN yang menegaskan bahwa optimalisasi PAD tidak hanya bergantung pada pemungutan, tetapi juga pada penggalian potensi, pemanfaatan aset, pendataan, sosialisasi, dan tata kelola pajak-retribusi daerah yang lebih terarah (Eljawati, 2022; Eljawati & Nurafdaliana, 2024; Riswati, 2022; Weku et al., 2023; Widowati Johannes et al., 2023).

## IV. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, Bank Papua telah menjalankan peran dalam meningkatkan potensi sumber PAD Kabupaten Biak Numfor melalui pembiayaan UMKM. Peran tersebut tampak dalam tiga bentuk, yaitu peran aktif, peran partisipatif, dan peran pasif. Peran aktif terlihat dari pendekatan langsung dan kunjungan lapangan kepada pelaku UMKM. Peran partisipatif terlihat dari keterlibatan dalam kerja sama program, sosialisasi, dan kegiatan pemberdayaan UMKM. Peran pasif terlihat dari penyediaan produk kredit UMKM serta informasi tertulis dan online tentang pembiayaan.

Hambatan yang dihadapi Bank Papua meliputi kerapian administrasi usaha yang belum merata, sebaran wilayah dan ragam karakter usaha yang tidak dapat diseragamkan, tuntutan menjaga prinsip kehati-hatian perbankan, serta pemanfaatan informasi digital yang belum sepenuhnya kuat. Hambatan tersebut menunjukkan bahwa pembiayaan UMKM tidak hanya membutuhkan produk kredit, tetapi juga pendampingan, literasi, dan kolaborasi lintas pihak.

Upaya optimalisasi yang perlu dilakukan meliputi penguatan pendekatan jemput bola, survei lapangan, kolaborasi dengan pemerintah daerah dan komunitas usaha, penyesuaian produk pembiayaan dengan karakter UMKM lokal, serta penguatan layanan digital tanpa meninggalkan komunikasi langsung. Dengan strategi tersebut, pembiayaan UMKM oleh Bank Papua dapat lebih kuat mendukung aktivitas ekonomi lokal yang berkaitan dengan potensi sumber PAD Kabupaten Biak Numfor.

### Keterbatasan Penelitian.

Penelitian ini memiliki keterbatasan pada ruang lingkup lokasi yang hanya berfokus pada Kabupaten Biak Numfor dan Bank Papua Cabang Biak. Selain itu, penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif sehingga tidak mengukur secara statistik besarnya pengaruh pembiayaan UMKM terhadap peningkatan PAD. Hubungan antara pembiayaan UMKM dan PAD dalam penelitian ini dipahami sebagai hubungan potensial dan tidak langsung melalui penguatan aktivitas ekonomi lokal.

### Arah Masa Depan Penelitian (*future work*).

Penelitian selanjutnya dapat mengembangkan kajian dengan pendekatan kuantitatif atau mixed methods untuk mengukur hubungan antara nilai pembiayaan UMKM, perkembangan omzet pelaku usaha, jumlah transaksi digital, legalitas usaha, dan kontribusi terhadap pajak serta retribusi daerah. Penelitian lanjutan juga dapat memperluas lokasi kajian pada beberapa cabang Bank Papua di kabupaten/kota lain agar diperoleh perbandingan yang lebih komprehensif.

## V. UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada Bank Papua Cabang Biak, Pemerintah Kabupaten Biak Numfor, pelaku UMKM yang menjadi informan, dosen pembimbing, keluarga, serta seluruh pihak yang telah memberikan dukungan, data, dan informasi selama proses penelitian hingga penyusunan skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik.

## VI. DAFTAR PUSTAKA

Anggoro, D. D. (2017). Pajak daerah dan retribusi daerah. UB Press. https://books.google.co.id/books?id=48dVDwAAQBAJ&printsec=copyright

Anggraeni, I., & Rahayu, A. N. (2024). Pengaruh penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) terhadap produktivitas UMKM dan pendapatan UMKM penerima KUR pada PT Bank

Mandiri KCM Pameungpeuk Banjaran. Jurnal Ilmiah Akuntansi, 15(April), 89-102. https://ejournal.unibba.ac.id/index.php/akurat/article/view/1445

Anita, Thantawi, T. R., & Suryani, E. (2021). Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi aksesibilitas UMKM terhadap produk pembiayaan di Bank Umum Syariah (studi di Kecamatan Pamijahan Bogor, Kabupaten Bogor). Sahid Banking Journal, 1(01), 45-59. https://doi.org/10.56406/sahidbankingjournal.v1i01.19

Bankpapua.co.id. (2024). Bank Papua gelar Pasar Digital 2024 dan pameran UMKM di Biak Numfor. https://bankpapua.co.id/home/index/detail/bank-papua-gelar-pasar-digital-2024-dan-pameran-umkm-di-biak-numfor

Bankpapua.co.id. (2025). Visi misi Bank Papua. https://www.bankpapua.co.id/home/page/s/visi-misi-48-32

Eljawati. (2021). Peran UMKM dalam meningkatkan kunjungan wisatawan di Kecamatan Sidamulih Kabupaten Pangandaran. Jurnal Ekonomi dan Keuangan Publik, 8(1), 32-46. https://ejournal.ipdn.ac.id/JEKP/article/view/2782

Eljawati. (2022). Potensi retribusi daerah dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Bandung. JEKP (Jurnal Ekonomi dan Keuangan Publik), 9(1), 40-50. https://ejournal.ipdn.ac.id/JEKP/article/view/2784

Eljawati, & Nurafdaliana. (2024). Optimalisasi pemanfaatan aset dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah. JEKP (Jurnal Ekonomi dan Keuangan Publik), 11(2), 144-155. https://ejournal.ipdn.ac.id/JEKP/article/view/4651

Erlando, A., Riyanto, F. D., & Masakazu, S. (2020). Financial inclusion, economic growth, and poverty alleviation: Evidence from eastern Indonesia. Heliyon, 6(10), e05235. https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2020.e05235

Gunawan, B. A., Alfarisi, M. F., & Rahim, R. (2025). Pengaruh pendapatan non bunga (fee based income), permodalan, dan risiko bank terhadap kinerja Bank Pembangunan Daerah (BPD) di Indonesia pada masa sebelum dan setelah pandemi Covid-19. Journal of Accounting and Finance Management, 6(3), 1721-1731. https://doi.org/10.38035/jafm.v6i3.2304

Kekry, B. P. N. (2020). Indeks kemampuan keuangan daerah di Provinsi Papua. Jumabis: Jurnal Manajemen dan Bisnis, 4(1), 27-34. https://doi.org/10.55264/jumabis.v4i1.63

Koreri.com. (2024). Kelurahan Samofa-Bank Papua sosialisasi pemberian modal usaha pelaku UMKM. https://koreri.com/2024/03/26/kelurahan-samofa-bank-papua-sosialisasi pemberian-modal-usaha-pelaku-umkm

Lu, Z., Wu, J., Li, H., & Nguyen, D. K. (2022). Local bank, digital financial inclusion and SME financing constraints: Empirical evidence from China. Emerging Markets Finance and Trade, 58(6), 1712-1725. https://doi.org/10.1080/1540496X.2021.1923477

Miranda, M., & Rafiqi, I. (2025). Pengaruh perbankan syariah terhadap financial deepening di Indonesia dengan inflasi sebagai variabel moderating. Journal of Sharia Economics, 7(1), 1-16. https://doi.org/10.35896/jse.v7i1.1005

Mustakim, M., Asnawi, M., & Aedah, N. (2024). Implementasi kebijakan BUMD Bank Papua untuk peningkatan Pendapatan Asli Daerah Provinsi Papua. Jurnal Kebijakan Publik, 7(2), 95-103. https://doi.org/10.31957/jkp.v7i2.4425

Nurdin, I., & Hartati, S. (2019). Metodologi penelitian sosial. Media Sahabat Cendekia. https://eprints.ipdn.ac.id/4510/

Pranowo, M. D. (2024). Peran Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa dalam pengembangan kapasitas bagi pengurus BUMDes Sejahtera Tanjungmojo di Kecamatan Kangkung,

Kabupaten Kendal [Skripsi, Institut Pemerintahan Dalam Negeri]. IPDN Repository. https://eprints.ipdn.ac.id/17873/

Priatman, A. N. P. (2023). Kontribusi dividen BUMD terhadap Pendapatan Asli Daerah Provinsi Jawa Barat periode 2018-2022 [Tugas akhir, Universitas Padjadjaran]. Perpustakaan FISIPUnpad. https://lib.unpad.ac.id/index.php?id=44999&keywords=&node=Fakultas+Ilmu+Sosial+dan+Ilmu+Politik&p=show_detail

Putra, S. A., Riyanto, V., Supartono, A. R., Emmanuel, J., Hagi, I. A., & Nurfauzi, M. A. (2024). Relevansi kemandirian fiskal daerah: Sebuah tinjauan. Jurnal Terapan Pemerintahan Minangkabau, 4(1), 17-28. https://doi.org/10.33701/jtpm.v4i1.4131

Rarassati, O., Pakpahan, R., & Setiawan. (2022). Pengaruh Dana Pihak Ketiga dan Non Performing Loan terhadap penyaluran kredit di masa pandemi pada BPD di Pulau Jawa. Indonesian Journal of Economics and Management, 2(3), 630-639. https://doi.org/10.35313/ijem.v2i3.3754

Resubun, H. M., Siahay, A. Z. D., & Kambuaya, M. K. P. (2022). Analisis pengelolaan dana pemerintah daerah dan kinerja keuangan PT Bank Papua. KEUDA: Jurnal Kajian Ekonomi dan Keuangan Daerah, 7(3), 197-206. https://doi.org/10.52062/keuda.v7i3.2492

Riswati. (2022). Analisis kebijakan pengelolaan pajak daerah dalam meningkatkan PAD di Kabupaten Bandung. JEKP (Jurnal Ekonomi dan Keuangan Publik), 9(1), 12-22. https://ejournal.ipdn.ac.id/JEKP/article/view/2780

Rosavina, M., Rahadi, R. A., Kitri, M. L., Nuraeni, S., & Mayangsari, L. (2019). P2P lending adoption by SMEs in Indonesia. Qualitative Research in Financial Markets, 11(2), 260-279. https://doi.org/10.1108/QRFM-09-2018-0103

Saifurrahman, A., & Kassim, S. H. J. (2023). Mitigating asymmetric information to enhance MSME Islamic financial inclusion by Islamic banks in Indonesia. Qualitative Research in Financial Markets, 15(3), 453-470. https://doi.org/10.1108/QRFM-12-2021-0202

Sanga, B., & Aziakpono, M. (2023). FinTech and SMEs financing: A systematic literature review and bibliometric analysis. Digital Business, 3(2), 100067. https://doi.org/10.1016/j.digbus.2023.100067

Simangunsong, F. (2017). Metodologi penelitian pemerintahan. Alfabeta. https://inlislite.ipdn.ac.id/opac/detail-opac?id=776

Weku, J., Syahbana, A., & Sururama, R. (2023). Pengelolaan pajak restoran dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kota Medan. JEKP (Jurnal Ekonomi dan Keuangan Publik), 10(1), 1-20. https://ejournal.ipdn.ac.id/JEKP/article/view/3135

Widowati Johannes, A., Sururama, R., & Pratama, A. Y. (2023). Strategi Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dalam pengelolaan pajak reklame terhadap Pendapatan Asli Daerah. JEKP (Jurnal Ekonomi dan Keuangan Publik), 10(2), 191-203. https://ejournal.ipdn.ac.id/JEKP/article/view/3858